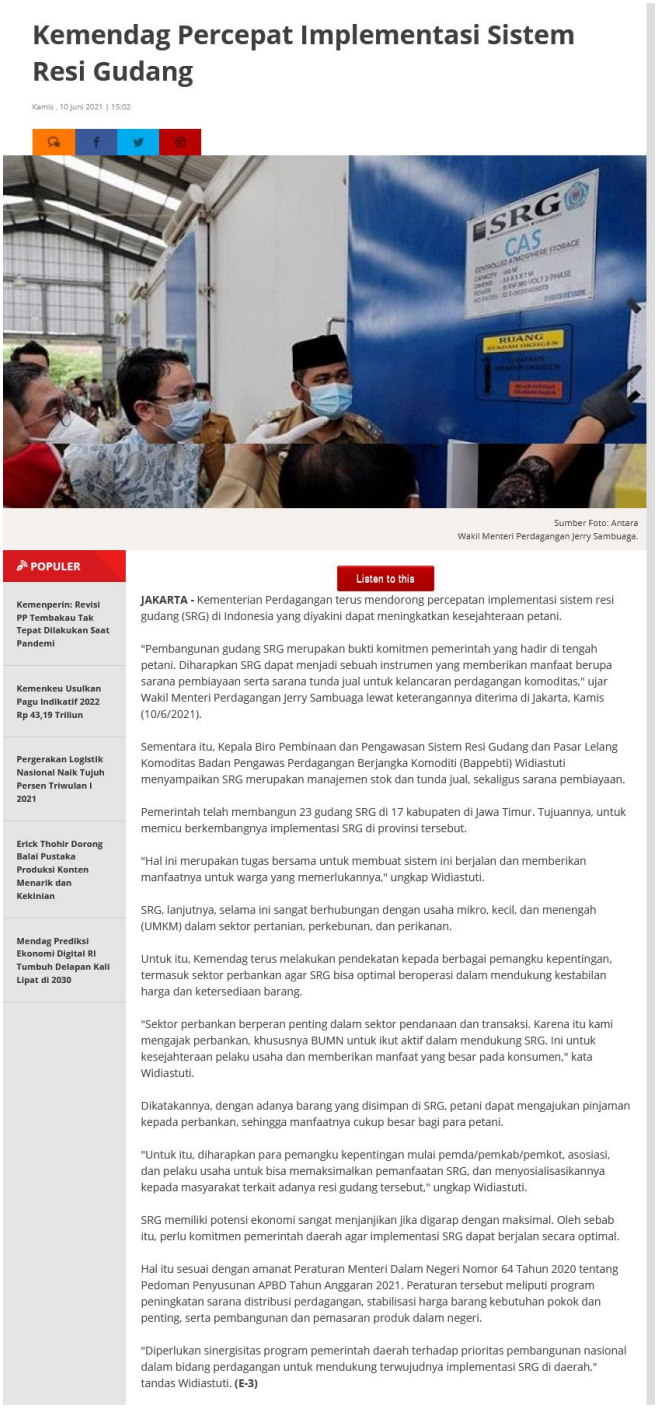
Kemendag Percepat Implementasi Sistem Resi Gudang

Tanggal	: Kamis , 10 Juni 2021
Media	: Sinarharapan.co
Halaman	: -
Wartawan	: E-3
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Jerry Sambuaga *(Wakil Menteri Perdagangan)*, Widiastuti *(Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dann PLK Bappebti)*
Rubrik	: Ekonomi
Topik	: Sistem Resi Gudang



Kemendag Percepat Implementasi Sistem Resi Gudang

Kamis , 10 Juni 2021 | 15:02

Sumber Foto: Antara
Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga.

POPULER

- Kemenperin: Revisi PP Tembakau Tak Tepat Dilakukan Saat Pandemi
- Kemenkeu Usulkan Pagu Indikatif 2022 Rp 43,19 Triliun
- Pergerakan Logistik Nasional Naik Tujuh Persen Triwulan I 2021
- Erick Thohir Dorong Balai Pustaka Produksi Konten Menarik dan Kekinian
- Mendag Prediksi Ekonomi Digital RI Tumbuh Delapan Kali Lipat di 2030

Listen to this

JAKARTA - Kementerian Perdagangan terus mendorong percepatan implementasi sistem resi gudang (SRG) di Indonesia yang diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

"Pembangunan gudang SRG merupakan bukti komitmen pemerintah yang hadir di tengah petani. Diharapkan SRG dapat menjadi sebuah instrumen yang memberikan manfaat berupa sarana pembiayaan serta sarana tunda jual untuk kelancaran perdagangan komoditas," ujar Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga lewat keterangannya diterima di Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Widiastuti menyampaikan SRG merupakan manajemen stok dan tunda jual, sekaligus sarana pembiayaan.

Pemerintah telah membangun 23 gudang SRG di 17 kabupaten di Jawa Timur. Tujuannya, untuk memicu berkembangnya implementasi SRG di provinsi tersebut.

"Hal ini merupakan tugas bersama untuk membuat sistem ini berjalan dan memberikan manfaatnya untuk warga yang memerlukannya," ungkap Widiastuti.

SRG, lanjutnya, selama ini sangat berhubungan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Untuk itu, Kemendag terus melakukan pendekatan kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor perbankan agar SRG bisa optimal beroperasi dalam mendukung kestabilan harga dan ketersediaan barang.

"Sektor perbankan berperan penting dalam sektor pendanaan dan transaksi. Karena itu kami mengajak perbankan, khususnya BUMN untuk ikut aktif dalam mendukung SRG. Ini untuk kesejahteraan pelaku usaha dan memberikan manfaat yang besar pada konsumen," kata Widiastuti.

Dikatakannya, dengan adanya barang yang disimpan di SRG, petani dapat mengajukan pinjaman kepada perbankan, sehingga manfaatnya cukup besar bagi para petani.

"Untuk itu, diharapkan para pemangku kepentingan mulai pemda/pemkab/pemkot, asosiasi, dan pelaku usaha untuk bisa memaksimalkan pemanfaatan SRG, dan menyosialisasikannya kepada masyarakat terkait adanya resi gudang tersebut," ungkap Widiastuti.

SRG memiliki potensi ekonomi sangat menjanjikan jika digarap dengan maksimal. Oleh sebab itu, perlu komitmen pemerintah daerah agar implementasi SRG dapat berjalan secara optimal.

Hal itu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021. Peraturan tersebut meliputi program peningkatan sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting, serta pembangunan dan pemasaran produk dalam negeri.

"Diperlukan sinergisitas program pemerintah daerah terhadap prioritas pembangunan nasional dalam bidang perdagangan untuk mendukung terwujudnya implementasi SRG di daerah," tandas Widiastuti. **(E-3)**